



## Dinamika posisi identitas Etnis Tionghoa di Tanjungpinang dalam tinjauan teori identitas sosial

Kusyadi<sup>1</sup>, Muhammad Jufri<sup>2</sup>, Jupri Yadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>1</sup>[kusyadi3521@gmail.com](mailto:kusyadi3521@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadjufri@gmail.com](mailto:muhammadjufri@gmail.com), <sup>3</sup>[jupriyadi020701@gmail.com](mailto:jupriyadi020701@gmail.com)

---

**Info Artikel :**

Diterima :

20 Januari 2023

Disetujui :

15 Januari 2023

Dipublikasikan :

25 Januari 2023

---

**ABSTRAK**

Pada dasarnya setiap individu ingin memiliki identitas sosial yang positif. Dalam sudut pandang teori identitas sosial, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai dorongan psikologis yang penting dalam tindakan individu di semua interaksi sosial. Selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat posisi identitas Indonesia-Tionghoa terpinggirkan, baik di masa penjajahan maupun masa kemerdekaan. Dinamika posisi identitas Indonesia-Tionghoa pada dasarnya berkaitan dengan perlakuan pemerintah. Tampaknya upaya untuk memiliki identitas sosial yang positif, mobilitas sosial orang Indonesia-Tionghoa bervariasi dan bergantung pada persepsi masing-masing kelompok dalam kaitannya dengan cara memperbaiki citra diri. Selain itu, ada juga kecenderungan mereka mencoba melakukan perubahan sosial melalui improvisasi citra diri dari identitas Tionghoanya.

**Kata kunci:** posisi, identitas sosial, tionghoa, interaksi sosial

---

**ABSTRACT**

*Basically every individual wants to have a positive social identity. From the point of view of social identity theory, the desire to have a positive social identity is seen as an important psychological drive in individual action in all social interactions. So far, there have been many policies by the Indonesian government that have marginalized the position of the Indonesian-Chinese identity, both during the colonial period and during the independence period. The dynamics of the Indonesian-Chinese identity position are basically related to the treatment of the government. It seems that the effort to have a positive social identity, the social mobility of Indonesian-Chinese people varies and depends on the perception of each group in terms of how to improve self-image. In addition, there is also a tendency for them to try to make social changes through improvising their Chinese identity.*

**Keywords:** position, social identity, Chinese, social interaction



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

### PENDAHULUAN

Dinamika yang unik ditunjukkan oleh proses identifikasi diri etnis Tionghoa di Indonesia. Posisi etnis Tionghoa di Indonesia tampaknya belum menemukan format yang tepat jika dibandingkan dengan situasi etnis Tionghoa di beberapa negara tetangga, seperti seperti Filipina atau Thailand, di mana orang Tionghoa telah berakulturasi dan menjadi warga negara pribumi. Tampaknya hal ini masih terjadi di Indonesia. Untuk membedakan etnis Tionghoa dari kelompok etnis pribumi lainnya, digunakan istilah pribumi dan nonpribumi.

Sebaliknya, istilah non-pribumi ini tampaknya tidak berlaku untuk imigran etnis lain, seperti orang Arab dan India. Meskipun orang Cina telah bereproduksi dan tinggal di Indonesia selama ratusan tahun, mereka masih percaya bahwa mereka adalah nomaden — orang yang hidup dan mencari untuk makanan di negara lain. Orang Cina juga membawa moniker WNI, lengkap dengan berbagai atribusi yang biasanya membawa konotasi negatif. Kesalahpahaman umum bahwa orang Tionghoa hanya diterima di teras depan rumah dan tidak diterima sebagai bagian dari keluarga.

Selain itu, baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan, posisi etnis minoritas ini telah mengakar kuat karena kebijakan penguasa. Peristiwa G30S PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998 adalah dua peristiwa yang sangat memukul masyarakat Tionghoa selama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Lan, peristiwa tahun 1965 menyebabkan orang Tionghoa di Indonesia trauma terbesar.

Sementara itu, Bachrun dan Hartanto sampai pada kesimpulan, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan pada bulan-bulan setelah kerusuhan Mei 1998, bahwa telah terjadi krisis identitas di kalangan orang Tionghoa karena kerusuhan telah menghancurkan semua upaya untuk sepenuhnya diterima sebagai orang Indonesia dalam waktu singkat. Seorang ahli Cina terkenal, Suryadinata, percaya bahwa mengatasi masalah identitas sangat penting untuk menyelesaikan "masalah Cina" di Indonesia. Dalam tinjauan teori identitas sosial, uraian berikut akan mengupas tentang dinamika posisi identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Istilah "tinjauan literatur" mengacu pada ini. Penelitian yang mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, konsep, atau temuan yang terkandung dalam tubuh literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu dikenal sebagai tinjauan literatur atau penelitian literatur. Cooper tahun 2010 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, atau dekomposisi reguler dari data yang dikumpulkan, diikuti dengan pemahaman dan penjelasan untuk memastikan bahwa pembaca sepenuhnya memahami temuan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identitas Dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial**

Identitas merupakan hal yang esensial dalam setiap interaksi sosial dan selanjutnya mendefinisikan bentuk interaksi sosial tersebut. Menurut Lan, seseorang harus memiliki identitas agar dapat merasa memiliki dan berpartisipasi dalam masyarakat. Jeffrey Weeks<sup>6</sup> mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa identitas perlu dan patut mendapat banyak perhatian. Pertama, orang tidak pernah lupa untuk bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, "siapa kamu?" dalam kehidupan sehari-hari (Siapa kamu? kepada seorang kenalan baru. Dalam setiap interaksi sosial, ini adalah pertanyaan paling mendasar. Dia ingin tahu lebih dari sekedar nama, alamat, dan pekerjaan orang tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia juga ingin tahu siapa orang itu. Jika orang yang ditanyai tidak menjawab pertanyaan, itu menunjukkan bahwa dia tidak menampilkan identitasnya atau dirinya sebagai subjek. Setiap interaksi sosial didasarkan pada subjektivitas<sup>7</sup>. Kedua, identitas adalah tentang perasaan seperti milik Anda, apa Anda memiliki kesamaan dengan orang lain, dan apa yang membedakan Anda dari mereka. Dalam bentuknya yang paling mendasar, identitas memberikan rasa lokasi pribadi dan landasan yang kokoh bagi individualitas. Dari sosiologi, identitas mengacu pada struktur kelompok, termasuk institusi seperti agama, bahasa, dan organisasi sosial dan politik. Dengan kata lain, ia memiliki "kekitaan" dan "kesadaran" (*esprit de corps*). Selain itu, konsep identitas berfokus pada diri, yang berarti iden menentukan apa dan siapa itu. Ini adalah salah satu contoh dari apa yang didefinisikan oleh Hogg, Abrams, dan Jenkins: "Identitas adalah konsep orang tentang siapa mereka, tentang orang seperti apa mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain," tulis Hogg dan Abrams (1988:2). Menurut Taylor dan Moghaddam<sup>10</sup>, "identitas mengacu pada cara-cara di mana individu dan kolektivitas dibedakan dalam hubungan sosial mereka dengan individu dan kolektivitas lain." Definisi identitas ini menyatakan bahwa "identitas mengacu pada cara di mana individu dan kolektivitas dibedakan dalam hubungan sosial mereka dengan individu dan kolektivitas lain." Dengan kata lain, "identitas mengacu pada cara di mana individu dan kolektivitas dibedakan dalam hubungan sosial mereka dengan individu dan kolektivitas lain." Semen: sosial peran, kategori, dan karakteristik yang dapat membantu dalam menentukan posisi seseorang dalam kelompok tertentu. Menurut Wendt<sup>11</sup>, identitas sosial adalah skema kognitif yang memungkinkan aktor untuk mengidentifikasi "siapa saya/kita" dalam keadaan tertentu dan posisi mereka dalam kerangka peran sosial yang didasarkan pada pemahaman dan harapan bersama. Kesamaan budaya ada antara individu dengan identitas yang sama.

Menurut Hogg dan Abrams, individu dikategorikan menurut negara, ras, kelas sosial, pekerjaan, jenis kelamin, dan etnis, di antara faktor-faktor lain, dalam hierarki sosial. Ada struktur sosial yang berbeda dalam masyarakat yang menentukan kekuatan dan status hubungan antara individu dan kelompok karena masing-masing kategori sosial ini memiliki martabat, status, dan kekuatan. Pada dasarnya, setiap orang ingin memiliki identitas sosial yang baik. Hogg dan Abrams menegaskan bahwa ini dilakukan untuk kesetaraan sosial dan pengakuan partai politik. Bahkan Laker menegaskan bahwa individu dan kelompok akan berusaha untuk mengidentifikasi dengan identitas

atau kelompok superior ketika mereka percaya bahwa menjadi anggota suatu kelompok kurang penting. Fenomena kesalahan identifikasi adalah ini. Anak-anak kulit hitam di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan fenomena ini dengan lebih memilih untuk mengidentifikasi dengan orang kulit putih daripada ras mereka sendiri.

Perilaku individu adalah cerminan masyarakat secara keseluruhan, menurut teori identitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur masyarakat yang "kompleks", seperti kelompok, organisasi, dan budaya, serta identifikasi individu dengan unit kolektif ini, struktur dan prosedur internal langsung. Kompetensi budaya adalah pusat dari teori ini karena keanggotaan dalam suatu kelompok mempengaruhi dan menentukan pemikiran dan perilaku individu. Menurut Wendt, identitas Sosial adalah skema kognitif yang memungkinkan aktor untuk mengidentifikasi "siapa saya/kita" dalam keadaan tertentu dan posisi mereka dalam struktur peran sosial pemahaman dan harapan bersama. Menurut teori identitas sosial, individu berperilaku, berpikir, dan merasa seperti anggota kelompok kolektif dan lembaga.

Menurut Hogg dan Abrams, individu dikategorikan menurut negara, ras, kelas sosial, pekerjaan, jenis kelamin, dan etnis, di antara faktor-faktor lain, dalam hierarki sosial. Ada struktur sosial yang berbeda dalam masyarakat yang menentukan kekuatan dan status hubungan antara individu dan kelompok karena masing-masing kategori sosial tersebut memiliki martabat, status, dan kekuatan.

Pada dasarnya, setiap orang ingin memiliki identitas sosial yang baik. Hogg dan Abrams menegaskan bahwa ini dilakukan untuk kesetaraan sosial dan pengakuan partai politik. Bahkan Laker menegaskan bahwa jika seseorang atau kelompok percaya bahwa identitas mereka sebagai anggota suatu kelompok kurang penting, mereka akan salah mengidentifikasi diri mereka sendiri, mencoba untuk mengidentifikasi dengan identitas atau kelompok yang lebih baik. Anak-anak kulit hitam di Amerika Serikat, misalnya, menunjukkan fenomena ini, tidak menyukai ras mereka sendiri dan lebih memilih untuk mengidentifikasi dengan orang kulit putih. Menurut teori identitas sosial, perilaku individu merupakan cerminan dari unit masyarakat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan prosedur internal dipandu oleh struktur masyarakat yang "kompleks", seperti kelompok, organisasi, budaya, dan yang terpenting, identifikasi individu dengan unit kolektif ini. Karena pemikiran dan perilaku individu dipengaruhi dan ditentukan oleh keanggotaan kelompok, kompetensi budaya adalah inti dari teori ini.

Menurut teori identitas sosial, individu berpikir, merasa, dan bertindak sebagai anggota lembaga budaya, kelompok kolektif, dan budaya. Kognisi sosial individu ditafsirkan secara sosial berdasarkan kerangka acuan kolektif atau kelompok mereka, menurut pendekatan identitas sosial. misalnya, imigran mungkin enggan untuk berakulturasi jika mereka percaya bahwa mereka akan terus distigmatisasi bahkan jika mereka kompeten secara budaya dalam budaya dominan karena warna kulit gelap atau aksen bahasa mereka.

Hubungan antara kelompok pada umumnya dan konflik sosial pada khususnya merupakan pokok bahasan teori identitas sosial. Ada tiga poin utama dalam teori ini: 1) Orang didorong untuk menjaga konsep diri yang positif, 2) Konsep diri ini sebagian besar diturunkan dari identifikasi kelompok, dan 3) Orang membuat identitas sosial yang positif dengan membandingkan kelompok dalam dan kelompok luar mereka. Meskipun tidak ada persaingan atau persaingan yang jelas antar kelompok, teori identitas sosial berpendapat bahwa proses perbandingan sosial internal mendorong konflik. Pandangan cenderung mendukung dalam -groups over-groups ketika faktor struktural seperti kekuasaan, hierarki, dan kurangnya sumber daya diperhitungkan.

Menurut teori identitas sosial, tindakan individu dalam setiap interaksi sosial dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk memiliki identitas sosial yang positif. Hal ini dicapai melalui perbandingan sosial, yang dianggap sebagai metode untuk menentukan posisi dan status identitas sosial seseorang. perbandingan dengan orang atau kelompok lain inilah yang disebut dengan proses perbandingan sosial. Perbandingan ini digunakan untuk membantu orang membuat penilaian khusus tentang identitas sosial mereka dalam kaitannya dengan identitas sosial lainnya.

Jika ternyata identitas sosial sedang mengalami degradasi baik dalam skala individu maupun kelompok, upaya selalu dilakukan untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan meningkatkan citra. Mobilitas sosial dan perubahan sosial adalah dua cara untuk bekerja menuju identitas sosial yang positif di konteks makro-sosial (kelompok, komunitas).

Kognisi dan identitas sosial:

Peralihan orang dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi dikenal sebagai mobilitas sosial. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi ketika ada banyak kesempatan untuk bergerak. Namun, kelompok bawah akan berusaha untuk meningkatkan sosial kolektif mereka. Status jika tidak ada kesempatan untuk mobilitas sosial. Mengubah status ke tingkat yang lebih tinggi adalah pilihan pertama. Jika kemungkinan bergeser ke posisi yang lebih tinggi tidak ada, maka upaya yang dilakukan adalah memperbaiki citra kelompok agar kesan tidak terlalu buruk.

### **Posisi Identitas Etnis China Dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial**

Dinamika posisi identitas etnis Tionghoa sebenarnya berkaitan dengan perlakuan yang mereka terima dari penguasa. Dalam Sarwono dan Susetyo disebutkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, perbedaan status etnis ditegakkan secara ketat. Orang Eropa diberi status tertinggi dan memiliki hak dan fasilitas terbaik. Orang Cina yang pada waktu itu disebut orang Timur Asing (*vreemde osterlingen*; *oriental timur*) memiliki status di bawah orang Eropa, dan penduduk asli (*inlanders*) diberi status terendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti orang Eropa).

Hal ini merupakan kebijakan yang sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mempertahankan pemisahan masyarakat Tionghoa dan penduduk asli, yang disebut dengan 'Membagi dan Memerintah'. Hal ini disebabkan adanya ketakutan jika masyarakat Tionghoa bersatu dengan penduduk asli. Kelompok, maka akan memiliki kekuatan untuk menentang kolonialisme Belanda di Indonesia<sup>22</sup>. Upaya ini dimaksudkan oleh penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan kelompok pribumi terhadap orang Tionghoa. Salah satu contoh upaya ini adalah keistimewaan keturunan Tionghoa seperti pendidikan yang lebih baik dan kesempatan kerja.

Dalam status menengah ini, orang Tionghoa memperbaiki citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa atau Belanda. Banyak orang Tionghoa yang dididik dengan gaya Eropa, cara berpakaianya juga Eropa, mereka juga menganut agama Protestan dan Katolik. seperti orang

Eropa lainnya selain kepercayaan yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka, dan sebagainya. Sangat jarang orang Tionghoa mengidentifikasi diri dengan identitas pribumi, karena status pribumi yang lebih rendah. lebih untuk perdagangan dan kepentingan lain yang dapat menguntungkan. Dalam kasus tertentu, masyarakat adat malah ditinggikan, misalnya ketika seorang wanita pribumi menikah dengan orang Tionghoa. Jadi, yang menonjol di kalangan orang Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda adalah kombinasi identitas tradisional Cina dan identitas gaya Eropa. Kebijakan "Membagi dan Memerintah" terhadap keturunan Tionghoa terus berlanjut hingga masa penjajahan Jepang. Penjajah Jepang sengaja memisahkan dan memaksa orang keturunan Tionghoa untuk belajar di sekolah yang dibuat khusus untuk mereka, dan mereka diharuskan menggunakan bahasa Mandarin dalam pengajarannya. dan proses pembelajaran. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa berbahasa Mandarin di luar jam sekolah. Beberapa orang keturunan Tionghoa juga dipekerjakan oleh tentara Jepang sebagai mata-mata.

Hal ini menyebabkan meningkatnya pandangan negatif terhadap keturunan Tionghoa karena dianggap membantu penjajah Jepang, yang tentunya sangat dibenci karena perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap penduduk asli.

Namun, situasinya tampak benar-benar berbeda ketika memasuki era kemerdekaan. Isu yang mengemuka terutama soal kepastian status kewarganegaraan. Sebagaimana dikemukakan Greif, orang Tionghoa saat itu terjepit di antara berbagai kepentingan, baik nasional maupun internasional. Dalam skala besar. Pemerintah Indonesia saat itu tidak bisa serta merta memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini diduga membatasi jumlah orang Tionghoa yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Tionghoa, yaitu selain menjadi warga negara dari negara tempat mereka merantau, juga dilekatkan kewarganegaraan Tionghoa. Sebagai reaksi atas situasi ini, sejumlah tokoh Tionghoa membentuk "Baperki" (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya adalah menempatkan etnis Tionghoa setara dengan etnis/etnis lain dengan konsep integrasi. Sedangkan kelompok Tionghoa lainnya menginginkan asimilasi sebagai solusi.

Sejak peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965, keadaan benar-benar berbalik. Konsep integrasi politik telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis. Dengan demikian satu-satunya pilihan yang diberikan ruang oleh penguasa adalah asimilasi. Kebijakan asimilasi sebenarnya mengarahkan hubungan antaretnis, di mana hanya satu suku yang diharapkan melebur ke

dalam masyarakat lain. Menurut Leo Suryadinata (2002:45), asumsi yang mendasari kebijakan asimilasi diterapkan adalah bahwa orang Tionghoa masih dianggap "bermasalah". Orang Tionghoa dipandang sebagai "ancaman" karena pada masa Orde Lama, orang Tionghoa memiliki kecenderungan untuk setia kepada RRT. Ketika diberi ruang politik, mereka mengalihkan kesetiannya kepada RRT dan gerakan komunis.

Selain itu, karena dipandang kurang patriotik/nasionalis, eksklusif, dan mendominasi perekonomian nasional, orang Tionghoa semakin sulit diterima di Indonesia. Mereka akan lebih mudah diterima jika ingin membaaur untuk mencapai hal-hal yang diinginkan..

Padahal, itu adalah wilayah kehidupan pribadi mereka, termasuk memeluk Islam dan kawin campur dengan penduduk asli, selain ingin menunjukkan partisipasi politik (yang di era Orde Baru lebih didefinisikan sebagai kesetiaan orang Tionghoa kepada rezim)

Namun, implementasi kebijakan asimilasi ini lebih diwarnai dengan pendekatan keamanan. Banyak studi Tionghoa-Indonesia telah dilakukan untuk mencari solusi masalah Tionghoa dengan menekankan pencegahan ketidakstabilan politik. bidang politik dan budaya dalam rangka menyeimbangkan kekuatan ekonomi Cina, yang memang diberi kelonggaran untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebenarnya inilah akar permasalahan mengapa posisi identitas etnis Tionghoa menjadi begitu pelik. Pemerintah Orde Baru kala itu meragukan nasionalisme keturunan Tionghoa. berorientasi politik terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRC). RRC, khususnya Partai Komunis Tiongkok (PKC), dituduh membantu membesarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ikut serta dalam pergerakan Partai Komunis Tiongkok (PKI). Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965. Itu juga salah satu penyebabnya pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC pada tahun 1967.

Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) No.14 Tahun 1967 oleh pemerintah Orde Baru membuat masyarakat Tionghoa tidak lagi bisa merayakan ritual Konghucu, kepercayaan asli mereka. Termasuk merayakan Tahun Baru Imlek dengan mengadakan pertunjukan barongsai dan mengarak patung dewa atau toapekong di tempat umum. Surat kabar bertulisan Cina juga diberangus. Bahasa dan budaya Cina juga diajarkan di sekolah Cina tertutup. Sejak saat itu, orang Cina telah dipaksa untuk terlibat dalam budaya gerilya. Perayaan dan ritual yang terkait dengan agama, kepercayaan, dan adat Tionghoa asli diadakan di balik pintu tertutup. Komunitas Tionghoa adalah satu-satunya kelompok yang melakukan ritual Tahun Baru Imlek di lingkungan kuil.

Beberapa orang Indonesia keturunan Tionghoa merasa perlu untuk menyembunyikan identitas etnis dan budaya mereka untuk bertahan hidup di masyarakat Indonesia karena diskriminasi politik dan sosial yang mereka hadapi sebagai akibat dari "sinophobia." dengan mengganti nama Cina mereka dengan nama yang lebih Indonesia, , antara lain. Beberapa orang, seperti orang tua mereka, telah secara resmi meninggalkan ajaran Konfusianisme dan mengadopsi agama yang diakui oleh pemerintah untuk alasan yang sama.

Status etnis Tionghoa berada pada titik terendah setelah peristiwa 1965. Mereka ditawan oleh penguasa dan individu non-Tionghoa. Berbagai aksi kekerasan massal anti Tionghoa pecah pertama kali saat itu. teori identitas sosial, setiap kali citra suatu kelompok menderita, upaya dilakukan untuk memulihkan citra atau identitas sosial yang positif. Mobilitas sosial dan pergeseran norma-norma sosial adalah tindakan yang biasa dilakukan.

Tergantung bagaimana masing-masing kelompok memandang bagaimana memperbaiki citra, bentuk mobilitas sosial yang dilakukan tampak cukup beragam. Eksodus ke negara lain, seperti Belanda, Cina, dan sebagainya, adalah salah satu tanggapan yang dihasilkan. Junus Jahja, salah satu pemimpin kelompok asimilasi, mendorong orang Tionghoa untuk memeluk Islam sebagai kunci asimilasi total karena kelompok itu tampaknya mulai berkembang. Susetyo (2002) menemukan dalam studinya tentang siswa sekolah menengah dan mahasiswa etnis Tionghoa di Semarang subjek lebih cenderung mengadopsi ciri-ciri positif etnis Jawa sebagai identitas sosialnya. Dalam pencarian identitas ini, tampaknya menjadi salah satu pilihan. Identitas Tionghoa Jawa, Tionghoa Batak, Tionghoa Padang, Tionghoa Sunda, dan sebagainya pada akhirnya akan terbentuk. Namun, banyak dari mereka juga pindah ke luar negeri menjadi kelompok dengan identitas kosmopolitan, internasional, antaretnis, dan transnasional ketika mereka tidak dapat menemukan jati diri mereka. hal-hal yang membantu mereka meningkatkan citra diri mereka. Temuan studi Lan27 tentang

orientasi identifikasi diri dalam kaitannya dengan aspirasi politik di atas tampak menggambarkan dinamika ini.

Selain mobilitas sosial, tampaknya ada kecenderungan untuk melakukan perubahan sosial, khususnya dengan meningkatkan citra Tionghoa. Dengan beralih dari orientasi Tionghoa tradisional ke berorientasi nasional, salah satunya dilakukan. Tidak menutup kemungkinan generasi muda lebih cenderung menunjukkan kecenderungan ini karena mereka kurang pengetahuan tentang budaya tradisional Tiongkok, tidak dapat berbicara bahasa Mandarin, dan memiliki guru yang sangat baik yang sekarang. Akibatnya, ketionghoan kini disajikan dalam bentuk dan citra yang lebih dapat diterima yang tidak lagi dikaitkan dengan masa lalu yang traumatis.

Pasca terbitnya Keppres No 1, pencarian posisi identitas etnis Tionghoa mengalami titik balik yang positif. Inpres No 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 18 Januari 2000 juga mencabut Inpres tersebut. No.14 Tahun 1967/29. Akibatnya, warga keturunan Tionghoa tidak lagi memerlukan izin khusus untuk mengungkapkan berbagai aspek identitas etnis, kepercayaan, budaya, dan praktik tradisional mereka di depan umum.

Sejak saat itu, sesuatu yang berbau China mulai populer di Indonesia. Ucapan selamat tahun baru masyarakat China bergema di mana-mana. Untuk memperingati tahun Naga Emas, bisnis, hotel, dan restoran dibanjiri promo. memperingati Tahun Baru Imlek, perusahaan wisata menawarkan perjalanan ke Singapura, Hong Kong, dan bahkan Australia.

Sementara itu, singa dan singa semakin populer di bidang kesenian. Kesenian jenis ini sering ditampilkan di berbagai acara, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Tionghoa. Atraksi barongsai yang telah populer di Indonesia selama ratusan tahun tetapi dilarang selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, telah kembali.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika identitas etnis Tionghoa di Indonesia erat kaitannya dengan kekhususan kebijakan politik yang dijalankan oleh penguasa, yang memiliki kepentingan khusus dalam menempatkan etnis Tionghoa di Indonesia. posisi yang sejalan dengan kemauan politik mereka. Orang Cina sering terpojok oleh posisi genting kelompok minoritas. Pemberontakan G30S PKI, yang menurunkan status kelompok etnis Tionghoa ke titik terendah, menandai titik yang sangat tinggi dalam identitas etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menggunakan berbagai strategi, termasuk perubahan sosial dan mobilitas sosial, untuk menemukan kembali citra positif. identitas sosial mereka. Di sisi lain, sejak Keppres No. Tionghoa dapat menegaskan kembali identitas etnis, kepercayaan, budaya, dan tradisi asli mereka sejak tahun 2000.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bachrun, R., & Hartanto, B. (2000). Krisis identitas diri pada kelompok minoritas Tionghoa. In I. Wibowo (Ed.), *Harga yang harus dibayar: Sketsa pergulatan etnis Tionghoa di Indonesia* (pp. xx-xx). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.
- Burchell, R. (2004). *Community perceptions about Keppres 6/2000: Case study Yogyakarta*. Unpublished manuscript.
- Greif, S. W. (1991). *WNI: Problematik orang Indonesia asal Tionghoa*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Hogg, M., & Abrams, D. (1988). *Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group processes*. London: Routledge.
- Jenkins, R. (1996). *Social identity*. London: Routledge.
- Lan, T. J. (1998). Pengalaman etnik Tionghoa dalam pembentukan identitas (nasional) Indonesia. Paper presented at the *Simposium Etnis Tionghoa Sebagai Minoritas di Indonesia*, Depok, Indonesia.
- Markus, H. R., Kitayama, S., & Heiman, R. J. (1996). Culture and "basic" psychological principles. In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), *Social psychology: Handbook of basic principles* (pp. 857-913). New York: Guilford.

- Operario, D., & Fiske, S. T. (1999). Integrating social identity and social cognition: A framework for bridging diverse perspectives. In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds.), *Social identity and social cognition* (pp. 26-54). Cambridge, MA: Blackwell.
- Sarwono, S. W. (1999). *Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Penerbit xxx.
- Suryadinata, L. (1978). *Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China*. Kuala Lumpur, Malaysia: Heinemann Educational Books.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Susetyo, D. P. B. (2002). *Stereotip dan relasi antar etnis Cina dan etnis Jawa pada mahasiswa di Semarang* (Unpublished master's thesis). Universitas Indonesia, Depok.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. Austin (Eds.), *The social psychology of intergroup behavior* (pp. 7-24). Chicago, IL: Nelson-Hall.
- Tan, M. G. (1999). Aspirasi politik etnik Tionghoa. *Majalah Tempo*.
- Weeks, J. (1990). The value of difference. In J. Rutherford (Ed.), *Identity, community, culture, difference* (pp. xx-xx). London: Lawrence & Wishart.
- Wendt, A. (1994). Collective identity formation and the international state. *American Political Science Review*, 88(2), 384-396.